Sifat Perwakilan Dalam Negara

MASRI ANTONI
masriantoni03@gmail.com

2010003600122

UNES

A.PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gelombang reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah menjadi salah satu titik balik reformasi ketatanegaraan yang berkaitan dengan lembaga perwakilan di Negara Republik Indonesia, yang diantaranya adalah mencakup proses perubahan atau amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perubahan yang penting setelah dilakukannya amandemen ketiga tahun 2001 adalah perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Apabila dilihat ke belakang, setidaknya ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen di atas, yaitu Pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Kedua, diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR selama ini.¹

Kelahiran DPD tentu saja semakin mewarnai ide dan gagasan ketatanegaraan Indonesia yang memang semakin bergema sejak era reformasi dimulai.

Dengan adanya Amandemen UUD 1945 tersebut, sejumlah pengamat menyebut bahwa Indonesia menganut parlemen dengan sistem bikameral. Sistem itu lahir dari adanya dua kamar (two chambers) berupa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kandang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dari sinilah, kesalahpahaman bermula, dengan menyebut DPR dan DPD sebagai sistem bikameral. Padahal, tidak ada penegasan sama sekali dalam konstitusi Indonesia bahwa kita menganut sistem bikameral, sama halnya dengan UUD 1945 yang hanya membagi lembaga tinggi negara kita terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan sebuah BPK. Tetapi tidak mengatur secara tegas apakah lembaga seperti DPR adalah the lower house, sedangkan DPD

sebagai the upper house.

Kalau melihat ada dua kamar lembaga dalam MPR, penyebutannya memang bikameral, karena berbeda dengan mono kameral atau trikameral. DPD adalah the upper chamber, sedangkan DPR adalah the lower chamber. Tapi, penyebutan ini bisa keliru, ketika melihat proses penguncian dan pengebirian hak-hak DPD. Di sejumlah negara yang menganut sistem bikameral yang lemah, upper chamber hanya memiliki kekuasaan konsultatif, seperti di Inggris. The House of Commons menjalani kekuasaan legislatif yang superior, dengan mengesampingkan The House of Lords.

Sejak itulah lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) langsung menjadi wacana hangat untuk diperdebatkan di ranah akademik pada khususnya maupun publik pada umumnya. Perdebatan itu lebih banyak terletak pada kedudukan dan kewenangan DPD, sejauh mana DPD sebagai lembaga baru di dalam tubuh lembaga parlemen Indonesia ini dapat berperan aktif dalam mengartikulasikan suara-suara dari daerah di pusat dan seluas mana kewenangannya dalam pengambilan keputusan soal legislasi di parlemen. Ada banyak harapan, terutama dari suara-suara daerah yang sekian lama tenggelam di hadapan kepentingan pemerintah pusat, ketika lembaga DPD diciptakan. Perdebatannya bukan saja pada fungsi dan peranannya tetapi juga pada landasan sistem parlemen yang dianut dan pilihannya muncul pada dua sistem yaitu bikameral atau unikameral. UUD 1945 sudah mengatur dengan tegas mengenai peranan dan kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan negara. Bersamaan dengan itu pula, perjalanan peran dan kedudukan tersebut tetap didampingi oleh dua lembaga legislatif lainnya yaitu DPR dan MPR sebagai wujud representasi

rakyat pula. Ketiganya tetap mempunyai peran masing-masing dan bahkan wujud

Dengan merombak struktur perwakilan Indonesia menjadi dua kamar (bicameral) dengan posisi DPD sebagai kamar kedua (second chamber) di tubuh parlemen Indonesia dan meradikalisasi proses pemilihan anggota DPD secara langsung, lembaga DPD diharapkan menjadi sebuah lembaga perwakilan yang kredibel dan benar-benar mewakili kepentingan daerah dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma tentang konsep Trias Politica atau pemisahan kekuasaan ini. Pergeseran tersebut berkaitan pula dengan doktrin pembagian kekuasaan versus pemisahan kekuasaan yang dahulunya dianut pembagian kekuasaan secara vertikal (vertical distribution of power), sekarang dianut pemisahan kekuasaan secara horizontal (horizontal separation of power). Pembentukan DPD tentu saja menghadirkan beberapa macam pandangan akan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa sistem parlemen Indonesia sudah berubah dari sistem parlemen tunggal (unikameral) menjadi sistem parlemen dua kamar (bikameral). Pendapat kedua berpendapat bahwa sebenarnya dengan kehadiran DPD sebagai kamar kedua di parlemen tetap tidak mengubah sistem parlemen Indonesia yang bersifat unikameral sebab pada dasarnya DPD bukan merupakan lembaga legislatif sepenuhnya dan menjadi satu dengan DPR dalam bingkai kelembagaan MPR. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa, Indonesia malah telah menganut sistem parlemen tiga kamar (trikameral), karena kedudukan MPR yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem parlemen Indonesia dengan tetap

mempunyai Sekretariat Jenderal sendiri.

Kelahiran DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. Meskipun pada kenyataannya peran dan keberadaan DPD dalam penyelenggaraan hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat serta representasinya sebagai wakil daerah belum mampu menjawab tantangan tersebut secara maksimal.

Pada dasarnya DPD sengaja didesain hampir atau memang hendak menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituen perwakilannya. Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah berserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Dalam hal ini, sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan begitu pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Sejak awal, kehadiran DPD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) tidaklah dirancang sebagai suatu lembaga legislatif yang ideal. Merujuk catatan yang tersedia, begitu wewenang DPD disepakati dalam perubahan ketiga UUD 1945, bermunculan banyak kritik dan penilaian bahwa senator Senayan (DPD) tidak akan mampu memosisikan dirinya merepresentasikan kepentingan daerah. Alasannya

sederhana, Pasal 22D UUD 1945 hanya menyediakan ruang amat terbatas bagi anggota DPD dalam memenuhi imaji sebagai representasi kepentingan daerah. Secara sederhana, posisi DPD dapat dikatakan serba tanggung sebagai sebuah lembaga yang dihadirkan dengan imaji besar. Ihwal fungsi legislasi, misalnya, Pasal 22D Ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPD memiliki otoritas terbatas dengan adanya frasa "dapat mengajukan" dan "ikut membahas" rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Fungsi sub-ordinat DPD kian jelas karena dalam desain besar pembahasan RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, lembaga ini hanya diberi wewenang sempit, yaitu sebatas memberikan pertimbangan.

Peranan DPD RI dalam mengemban fungsi legislasi sebenarnya mulai berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012. Dalam putusan MK tersebut secara umum berkaitan dengan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pengujian beberapa pasal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun.

B.PEMBAHASAN

Pembentukan Lembaga Perwakilan

Rousseau menginginkan tetap berlangsung demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduknya dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisasi, maka

muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, tetapi sering juga disebut “Parlemen” atau kadang-kadang disebut “Dewan Perwakilan Rakyat”.⁶⁴ Lembaga perwakilan maupun Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terbentuk dari adanya prinsip kedaulatan rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat tersebut selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelebagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.

Masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi berdemokrasi sama sekali, niscaya pelebagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan berhasil melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi sangat memerlukan penataan-penataan yang bersifat kelembagaan dan sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih substansif.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.

Ciri-ciri penting lembaga perwakilan negara dalam arti sempit ini adalah bahwa organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan karena fungsinya itu berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.

1. Teori Lembaga Perwakilan

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan/penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilnya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.⁶⁵

a. Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik.

Bagi terwakili teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil;

b. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat;

c. Dalam teori organ, pencetus teori ini adalah Van Gierke dari Jerman. Menurut teori ini negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya secara eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling

tergantung sama lain. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh

Undang-undang Dasar

d. Dalam teori sosiologi Dieker, menyatakan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih; dan

e. Dalam teori hukum obyektif dari Duguit, menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah, jadi ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya.

Macam-macam lembaga perwakilan yaitu suatu lembaga sebagai wadah untuk mewakili suara rakyat. kebanyakan dari parlemen-parlemen yang ada sekarang ini terdiri dari 2 kamar (majelis). Parlemen dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta sistem negaranya. Dalam bentuk kerajaan umumnya terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Ada juga yang memiliki bentuk negara Republik dan sistemnya Federal maka majelisnya terdiri dari Senat dan DPR. Dalam hal ini membandingkan dua negara, Negara Indonesia dengan lembaga-lembaga perwakilannya dan negara Filipina dengan Senat dan DPR. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan Indonesia tersebut yaitu:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Awal kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga negara yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP inilah dianggap sebagai MPR yang pertama.⁷⁵ Muncul keinginan untuk membentuk suatu lembaga sebagai penjelmaan dari

aspirasi masyarakat yang berupa perwakilan maka terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidato bersejarah, 1 Juni 1945 dalam pembahasan BPUKI. satu prinsip yang mendasari sistem permusyawaratan itu ialah sila ketiga Pancasila, tentang mufakat dan demokrasi.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tegas penjelasan di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden kecuali itu semua anggota-anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya dapat diminta mempertanggungjawabkan.

Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Fungsi Lembaga Perwakilan

Fungsi lembaga perwakilan atau yang disebut parlemen, umumnya mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

a. Fungsi perundang-undangan;

Fungsi perundang-undangan di sini adalah membentuk :

1. Undang-undang biasa seperti UU pemilu, UU pajak dan sebagainya
2. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian dengan Luar Negara

b. Fungsi pengawasan; dan

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh Parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi menurut Undang-undang yang dibentuk oleh Parlemen. Untuk melaksanakan fungsi Parlemen diberi beberapa

hal antara lain :

1. Hak bertanya;
2. Interpelasi (minta keterangan);
3. Angket (mengadakan penyelidikan);
4. Mosi; dan
5. Amandemen (mengadakan perubahan).

c. Sarana pendidikan politik.

Fungsi atau peranan edukatif yaitu dalam Pendidikan Politik. Melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan Perwakilan di DPR, atau dimuat dan diulas oleh media massa, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut

Fungsi Perwakilan

Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrat.

C.PENUTUP

Keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.